

## **Kebijakan Harga Pembelian Gabah Pemerintah: Analisis Dua Rezim Politik di Indonesia**

### ***Government Rice Pricing Policy: Lessons from Two Political Regimes in Indonesia***

**Mahra Arari Heryanto\*, Ganjar Kurnia**

Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran  
\*Email: mahra.arari@unpad.ac.id  
(Diterima 01-07-2025; Disetujui 26-07-2025)

#### **ABSTRAK**

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) merupakan instrumen utama kebijakan stabilisasi harga pangan di Indonesia, khususnya untuk menjamin pendapatan petani padi melalui pengendalian harga Gabah Kering Panen (GKP). Namun, efektivitas HPP dalam memengaruhi harga GKP belum banyak dikaji secara empiris dalam jangka panjang dan lintas pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda berbasis data bulanan (Januari 2008–November 2024). Model dibangun untuk membandingkan dua periode pemerintahan, yaitu masa Presiden SBY (2008–2014) dan Presiden Jokowi (2014–2024), dengan variabel independen meliputi waktu (bulan), HPP, dan indeks harga input yang dibayar petani. Model regresi menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan SBY, HPP tidak signifikan terhadap harga GKP, namun harga GKP meningkat secara konsisten dari waktu ke waktu. Sebaliknya, pada masa Jokowi, HPP berpengaruh signifikan dan positif terhadap harga GKP, namun tren waktu menunjukkan penurunan harga, serta pengaruh biaya input sangat besar dalam mendorong kenaikan harga GKP. HPP pada era SBY berfungsi lebih sebagai jangkar harga dasar dalam konteks pasar yang relatif stabil, sedangkan pada era Jokowi HPP lebih aktif namun dibayangi oleh kenaikan biaya produksi. Dengan demikian, efektivitas HPP dalam meningkatkan kesejahteraan petani memerlukan integrasi kebijakan biaya input, infrastruktur, serta intervensi pasar yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Harga Pembelian Pemerintah, Gabah Kering Panen, harga petani, regresi linier, kesejahteraan petani

#### **ABSTRACT**

*The Government Purchasing Price (HPP) is a key policy instrument for stabilizing food prices in Indonesia, particularly aimed at ensuring farm-level income by regulating the price of Dry Harvested Unhusked Rice (GKP). However, its effectiveness in influencing GKP prices remains underexplored across different administrations and over time. This study applies a quantitative approach using multiple linear regression analysis based on monthly data from January 2008 to November 2024. The models compare two presidential periods: President SBY (2008–2014) and President Jokowi (2014–2024). Independent variables include time (in months), HPP, and the input price index paid by farmers. The regression results show that during the SBY administration, HPP had no significant effect on GKP prices, although GKP prices consistently increased over time. In contrast, during Jokowi's administration, HPP significantly and positively affected GKP prices, yet time trends indicated a declining price pattern. Moreover, increases in input costs strongly influenced the rise in GKP, suggesting that price gains did not necessarily translate to improved farmer welfare. Under SBY, HPP served more as a price floor in a relatively stable market. Under Jokowi, although more active, the HPP was overshadowed by escalating production costs. Therefore, HPP's effectiveness in enhancing farmer welfare depends on its integration with input cost policies, infrastructure support, and adaptive market interventions.*

*Keywords: Government Purchasing Price, Dry Harvested Unhusked Rice, farmer price, linear regression, farmer welfare*

#### **PENDAHULUAN**

Beras merupakan komoditas pangan pokok sangat penting bagi sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia, baik yang berada di wilayah perkotaan, maupun pedesaan. Bagi masyarakat di perkotaan, beras merupakan sumber pangan karbohidrat utama untuk pemenuhan gizi. Bagi masyarakat pedesaan, beras memiliki peran yang lebih krusial, baik dari segi ekonomi, sosial maupun, lingkungan. Selain sebagai sumber pangan utama, secara ekonomi, beras yang berasal dari padi, diproduksi (dibudidayakan) di wilayah pedesaan merupakan mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat pedesaan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Bahkan bagi daerah-daerah sentra produksi padi, seperti Pulau Jawa, padi banyak mewarnai budaya lokal dan tradisi masyarakat.

Pentingnya peran beras dalam suatu rantai pasok (dari produsen sampai konsumen) mulai dari hulu sampai ke hilir, bersumber dari desa sampai ke kota, telah mendorong pemerintah menerapkan kebijakan stabilitas harga pangan. Kebijakan stabilisasi harga beras di Indonesia secara aktif dimulai sejak tahun 1970-an, bersamaan dengan penerapan Revolusi Hijau dan pembentukan peran Bulog sebagai institusi utama pengelola pangan nasional (Cummings et al., 2006; Hoang & Meyers, 2015; Simatupang et al., 2018).

Intervensi negara melalui stabilisasi harga dianggap penting untuk menjamin pendapatan petani dan juga menjaga daya beli konsumen berpenghasilan rendah. Menurut Cummings et al. (2006), beberapa negara Asia telah menerapkan kebijakan stabilisasi harga pangan pokoknya, di antaranya India, Pakistan, Filipina, Bangladesh, Vietnam dan Indonesia. Keenam negara tersebut, mengalami fluktuasi harga pangan musiman di dalam negerinya, walau dengan tingkat yang berbeda. Melalui kebijakan stabilisasi harga pangan, keenam negara ini berupaya meredam volatilitas harga pangan internasional agar fluktuasi harga pangan dalam negeri dapat ditekan pada situasi yang menguntungkan, sehingga petani (produsen) dan konsumen dapat lebih terlindungi.

Instrumen stabilitas harga pangan di tingkat produsen oleh pemerintah Indonesia diwujudkan dalam bentuk harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah dan beras. HPP bertujuan untuk menjamin harga yang layak bagi petani padi dan menghindari kejatuhan harga saat panen raya di tingkat petani. Bulog sebagai kepanjangan tangan pemerintah berperan besar sebagai lembaga yang menstabilkan harga produsen (petani) dan konsumen melalui mekanisme pembelian dan distribusi sebagai cerminan praktik HPP (Cummings et al., 2006; Hoang & Meyers, 2015; Simatupang et al., 2018).

Perlu dipahami bahwa pengendalian harga menggunakan instrumen harga di tingkat produsen adalah masalah yang kompleks dan beragam, dengan berbagai tingkat efektivitas bergantung pada konteks dan implementasi. Kontrol harga dapat menstabilkan harga pangan dan melindungi produsen dari kondisi pasar yang tidak stabil (Aragie & Balié, 2016), tetapi juga dapat menyebabkan distorsi pasar dan konsekuensi ekonomi yang tidak diinginkan (Ghosh & Whally, 2002).

Harga gabah padi pada tingkat produsen di negara berkembang dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor yang kompleks, di antaranya kebijakan pemerintah, dinamika pasar, biaya produksi dan produktivitas, dan kondisi sosial ekonomi. Kebijakan pemerintah seperti harga dasar dapat berdampak langsung pada harga produsen (Hadi, 2006; Soliva et al., 2024), harga yang stabil bagi produsen penting untuk memastikan stabilitas pendapatan petani (Malian et al., 2016).

Dilihat dari dinamika pasar, aksesibilitas pasar dan kualitas infrastruktur seperti jalan secara signifikan memengaruhi harga gabah. Infrastruktur yang buruk dapat meningkatkan biaya transportasi, sehingga mengurangi harga bersih yang diterima oleh produsen (Ogah et al., 2019).

Aspek produksi dan produktivitas secara langsung dan tidak langsung dapat memengaruhi harga gabah di tingkat petani. Soliva et al. (2024) mengatakan bahwa investasi pada infrastruktur, adopsi teknologi, peningkatan metode pertanian, dan pemberian bantuan kepada petani skala kecil sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian yang kemudian secara umum dapat memengaruhi harga yang ditawarkan oleh produsen.

Biaya input utama seperti pupuk, pestisida, dan benih secara langsung memengaruhi profitabilitas usahatani padi. Biaya input yang tinggi dapat mengurangi pendapatan bersih, sehingga memengaruhi harga yang diterima petani. Selain itu, faktor sosial-ekonomi seperti pendidikan, pengalaman usahatani, dan karakteristik rumah tangga, dapat memengaruhi harga gabah melalui pasokan gabah yang dijual oleh rumah tangga petani padi (Chhom et al., 2023).

Selain faktor internal yang disebutkan, terdapat juga faktor eksternal yang memengaruhi harga gabah, seperti fluktuasi nilai tukar dan pasokan pasar beras global yang mampu memengaruhi harga gabah di tingkat petani. Faktor lingkungan dan iklim juga termasuk bencana alam menurut studi Barré (2011) dapat memengaruhi harga beras di pasar domestik dan petani di negara-negara berkembang Asia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan HPP dalam memengaruhi harga GKP di tingkat petani dengan menggunakan model regresi linier berbasis data bulanan. Apakah instrumen HPP selama ini cukup efektif memengaruhi harga gabah (GKP: Gabah Kering Panen) di tingkat petani? Penulis membandingkan seberapa efektif implementasi HPP selama dua dekade rezim pemerintah berkuasa di era pemerintahan SBY (tahun 2008-2014) dan Jokowi (tahun 2014-2024) dalam memengaruhi harga gabah (GKP) yang diterima petani.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan desain kuantitatif yang menurut Creswell (2016) bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis hubungan variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian. Variabel yang diidentifikasi adalah variabel-variabel yang berpengaruh terhadap harga gabah di tingkat petani, atau harga GKP (Gabah Kering Panen) yang diambil dari data nasional Indonesia.

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda untuk menganalisis beberapa variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen atau terikat. Analisis regresi berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen (Iwasaki, 2020).

Beberapa variabel independen dalam penelitian ini adalah  $x_1$ : Waktu urutan bulan,  $x_2$ : Harga Pembelian Pemerintah (Hadi, 2006; Soliva et al., 2024) dan  $x_3$ : Indeks Harga Input yang Dibayarkan Petani (Chhom et al., 2023). Sementara variabel dependen adalah  $y$ : Harga GKP dengan persamaan sebagai berikut:

$$y = a + x_1 + x_2 + x_3$$

Keterangan:

$y$  : Harga GKP (Gabah Kering Panen) (Rp/Kg)

$a$  : Koefisien *intercept*

$x_1$  : Waktu urutan bulan (bulan ke-1,2,3, ..., n)

$x_2$  : Harga Pembelian Pemerintah (HPP) (Rp/Kg)

$x_3$  : Indeks Harga Input yang Dibayarkan Petani

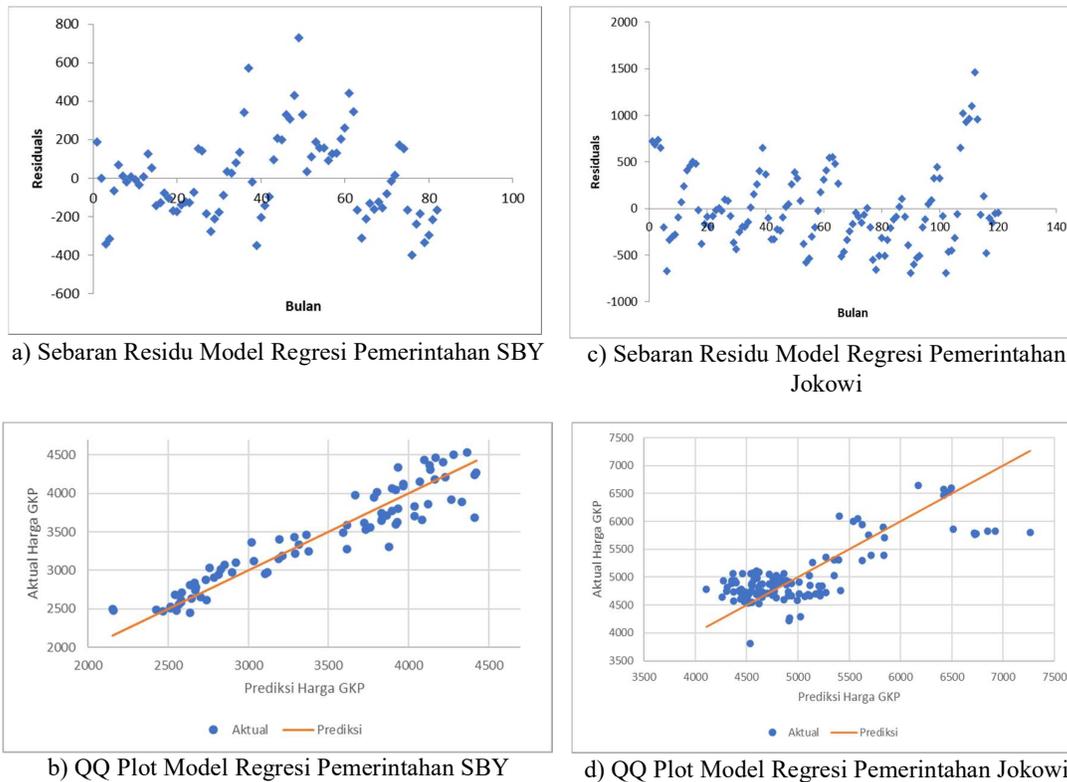
Adapun data yang digunakan adalah data sekunder berupa data bulanan Januari 2008 sampai dengan November 2024 di antaranya: a) Rata-rata Harga Gabah Bulanan<sup>1</sup> dan b) Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB) Subsektor Tanaman Pangan serta Perubahannya tahun 2008-2024<sup>2</sup>. Untuk periode pemerintahan SBY (Soesilo Bambang Yudhoyono) menggunakan data bulan Januari 2008 sampai Oktober 2024. Selanjutnya untuk era pemerintahan Jokowi (Joko Widodo), menggunakan data bulan November 2014 sampai November 2024 sesuai dengan masa pemerintahan masing-masing presiden.

Beberapa pertimbangan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam analisis linear berganda adalah multikolinieritas, dimana antar variabel independen saling berkorelasi (Ruan, 2024). Pertimbangan lainnya berkaitan dengan analisis residu untuk memvalidasi asumsi yang mendasari model dan memastikan keandalan kesimpulan statistik, seperti linearitas (hubungan antara variabel independen dan dependen harus linier), independensi (residu harus independen satu sama lain), normalitas (residu harus terdistribusi secara normal), dan homoskedastisitas (residu harus memiliki varians konstan). Pemenuhan asumsi-asumsi tersebut digambarkan dengan metode grafis agar lebih informatif untuk menilai asumsi regresi linear (Korner-Nievergelt et al., 2015; Martin et al., 2017). Perangkat lunak untuk memproses data regresi menggunakan Microsoft Excel 2021. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan fitur Data Analysis yang tersedia pada menu Data.

---

<sup>1</sup> Diunduh pada 23 Mei 2025 jam 18:30 WIB dari sumber: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAzNCMy/rata-rata-harga-gabah-bulanan-menurut-kualitas--komponen-mutu-dan-hpp-di-tingkat-petani.html>

<sup>2</sup> Diunduh pada 23 Mei 2025 jam 18:33 WIB dari sumber: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTcxOCMy/indeks-harga-yang-diterima-petani--it---indeks-harga-yang-dibayar-petani--ib---dan-nilai-tukar-petani-subsektor-tanaman-pangan--ntpp--serta-perubahannya--2018-100-.html>



**Gambar 1. Analisis Uji Residual Asumsi Model Regresi Pemerintahan SBY (kiri) dan Pemerintahan Jokowi (kanan)**

Beberapa asumsi yang dipenuhi dari kedua model (SBY dan Jokowi) di antaranya adalah linearitas, homoskedastisitas dan multikolinearitas. Artinya, semua variabel (bulan, HPP, indeks input) memiliki hubungan linear yang signifikan. Hal ini dapat dilihat sebaran plot residu yang secara visual dapat dilihat pada Gambar 1.a dan 1.c) tersebar terpengar dan berhamburan secara acak (Martín et al., 2017). Sementara itu untuk asumsi normalitas residual (Gambar 1.b dan 1.d), model regresi pemerintahan SBY menunjukkan kecenderungan yang lebih normal dibandingkan dengan regresi pemerintahan Jokowi. Terdapat banyak *outlier* pada model regresi pemerintahan Jokowi yang tidak dapat diprediksi oleh model, terutama pada akhir masa pemerintahannya dimana harga gabah mengalami kenaikan yang signifikan.

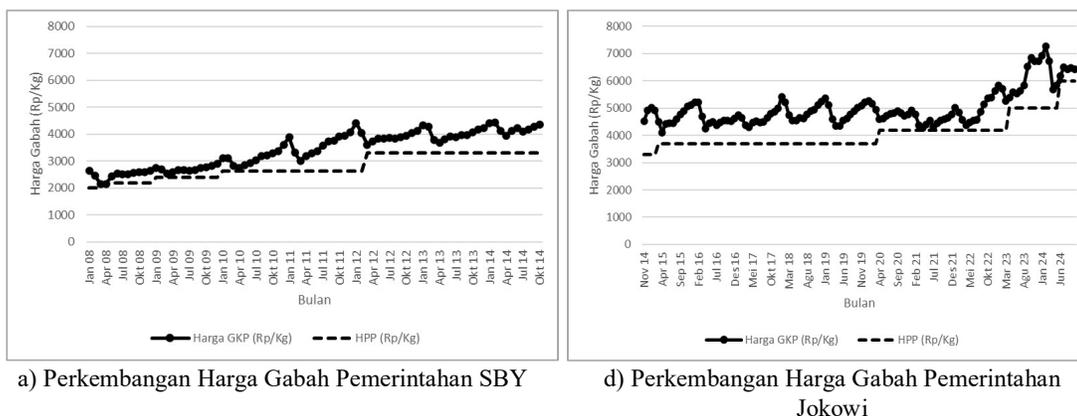
Pada asumsi autokorelasi, kedua model regresi tidak memenuhi asumsi ini. Terlihat pola sebaran residu yang mengelompok pada urutan waktu tertentu (Gambar 1.a dan 1.c). Hal ini mungkin terjadi karena pola musiman yang harga GKP yang terbentuk setiap tahun membentuk pola tertentu dan berulang, baik pada model regrasi SBY maupun model regresi Jokowi.

Meskipun asumsi regresi penting untuk validitas model regresi, tetapi pada praktiknya beberapa penyimpangan dari asumsi ini mungkin tidak secara signifikan memengaruhi kesimpulan model. Sedikit penyimpangan seperti yang terjadi pada normalitas model regresi pemerintahan Jokowi, menurut Martín et al. (2017) masih dapat ditoleransi, terutama pada sampel yang cukup besar melebihi teorema batas sentral (30 unit sampel).

Secara umum, model regresi masa pemerintahan SBY memenuhi sebagian besar asumsi klasik: linearitas, homoskedastisitas, dan distribusi residual yang mendekati normal. Sementara model reegresi masa pemerintahan Jokowi menunjukkan adanya heteroskedastisitas dan outlier yang memengaruhi akurasi prediksi, meskipun HPP dan indeks harga input bernilai signifikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif



a) Perkembangan Harga Gabah Pemerintahan SBY

d) Perkembangan Harga Gabah Pemerintahan Jokowi

**Gambar 2. Perkembangan Harga Gabah masa Pemerintahan SBY (kiri) dan Masa Pemerintahan Jokowi (kanan)**

Secara deskriptif harga gabah yang diterima petani sepanjang masa periode presiden SBY tampak selalu berada di atas HPP dengan jarak yang konsisten (Gambar 2.a). Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi HPP sebagai penopang harga minimum dapat berjalan dengan baik, walaupun tidak menentukan secara langsung harga pasar gabah di petani. Namun demikian, menurut Simatupang et al., (2018), jika hal tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lama mengindikasikan bahwa HPP yang ditetapkan tidak memiliki daya ungkit bagi pembentukan harga gabah di tingkat petani.

Selisih atau perbedaan yang semakin melebar antara HPP dengan harga pasar gabah di masa kedua pemerintahan SBY semakin mengaburkan efektivitas HPP dalam perannya memengaruhi harga gabah. Hal ini cenderung terus terjadi sampai periode pertama masa pemerintahan presiden Jokowi, dimana efektivitas HPP untuk melindungi petani produsen tergerus dan tidak bermakna.

Harga GPK pada masa pemerintahan SBY menunjukkan kecenderungan naik dengan dinamika musiman yang konsisten. Kenaikan HPP yang bertahap dan bertingkat sejalan dengan pola musiman, mencerminkan sifatnya yang lebih cenderung pada kebijakan administratif yang ditetapkan secara berkala, tidak mengikuti pergerakan harga pasar GPK dengan tingkat volatilitas antar waktu yang cukup tinggi (koefisien variasi = 19,2%). HPP pada masa SBY lebih berfungsi sebagai jangkar harga dasar, bukan pendorong utama insentif produsen beras. Petani menerima harga gabah di atas HPP karena faktor pasar yang lebih dominan, bukan karena dorongan kebijakan harga.

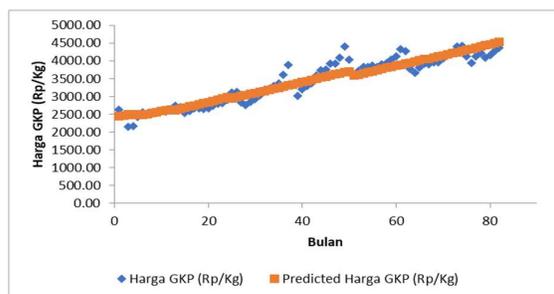
Memasuki era Jokowi (Gambar 2.b), terjadi lonjakan tajam harga gabah pada akhir tahun 2022 setelah mengalami pelandaian di periode pertama masa pemerintahannya. Tekanan harga pangan dan kenaikan biaya produksi telah mendorong harga gabah pada tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya, bahkan pada saat tertinggi harga GPK mencapai Rp 7.000 per kilogram. Akan tetapi, perlu dicermati bahwa harga GPK naik lebih cepat dan lebih tinggi dari HPP.

Pada periode kedua masa jabatan Jokowi, harga GPK dan kebijakan HPP tampak lebih koheren. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan harga HPP yang diikuti oleh kenaikan harga GPK beberapa bulan kemudian. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa kenaikan harga GPK yang jauh lebih tinggi dari HPP mengindikasikan bahwa HPP bukan satu-satunya pendorong, tetapi HPP cukup manjadi tumpuan harga saat harga GPK mengalami kejatuhan saat panen raya terjadi. Kenaikan harga input, terutama pupuk dan biaya tenaga kerja telah memicu lonjakan kenaikan harga GPK di tingkat petani.

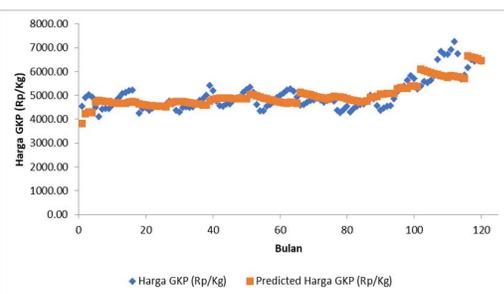
Bila dibandingkan, secara deskriptif dapat dikatakan bahwa HPP di era Jokowi memainkan peran yang lebih aktif dalam memengaruhi harga gabah, terutama setelah tahun 2022. Namun demikian, tekanan kenaikan biaya produksi dan dinamika pasar masih lebih dominan menaikkan harga GPK di pasar gabah.

### Analisis Regresi

Hasil regresi di masa pemerintahan pemerintahan SBY menunjukkan bahwa harga gabah meningkat dari waktu ke waktu dalam satuan bulan, tetapi hal ini tidak dipengaruhi secara signifikan oleh HPP. Keberadaan HPP pada era administrasi SBY berdasarkan temuan hasil analisis regresi, dapat dikatakan belum efektif dalam memengaruhi harga riil gabah di lapangan. Walau demikian, secara statistik model ini mampu menjelaskan variasi harga GKP dengan sangat baik (88,9%) ketika variabel waktu (bulan) dan indeks harga input disimulasikan secara bersamaan (Gambar 3.b).



a) Model Regresi Pemerintahan SBY



c) Model Regresi Pemerintahan Jokowi

b) Statistik Regresi Linear Berganda Pemerintahan SBY

| Regression Statistics |             |
|-----------------------|-------------|
| Multiple R            | 0.943128541 |
| R Square              | 0.889491446 |
| Adjusted R Square     | 0.885241117 |
| Standard Error        | 223.7078582 |
| Observations          | 82          |

|                    | Coefficients | P-value   |
|--------------------|--------------|-----------|
| Intercept          | 4513.189538  | 0.0616255 |
| Bulan*             | 37.1148111   | 0.0004005 |
| HPP (Rp/Kg)        | -0.22947036  | 0.1850507 |
| Indeks Harga Input | -15.67264833 | 0.4758286 |

\*signifikan pada tingkat kepercayaan 95%

d) Statistik Regresi Linear Berganda Pemerintahan Jokowi

| Regression Statistics |             |
|-----------------------|-------------|
| Multiple R            | 0.777526354 |
| R Square              | 0.60454723  |
| Adjusted R Square     | 0.594320004 |
| Standard Error        | 426.5035655 |
| Observations          | 120         |

|                     | Coefficients | P-value     |
|---------------------|--------------|-------------|
| Intercept           | -39202.12923 | 9.66829E-05 |
| Bulan*              | -71.05951927 | 6.60685E-05 |
| HPP (Rp/Kg)*        | 0.96692158   | 4.67738E-12 |
| Indeks Harga Input* | 274.5389874  | 4.83977E-05 |

\*signifikan pada tingkat kepercayaan 95%

**Gambar 3. Grafik Regresi Linear Berganda (atas) dan Statistik Regresi Linear (bawah) masa Pemerintahan SBY dan Masa Pemerintahan Jokowi**

Sementara itu, pada model masa pemerintahan Jokowi menunjukkan bahwa HPP memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap harga GKP terutama dalam konteks lonjakan harga gabah yang terjadi setelah tahun 2022. Begitu pula dengan faktor lain harga input produksi memiliki efek positif terhadap kenaikan harga GKP, artinya ketika biaya produksi naik, maka harga gabah yang diterima petani juga mengalami kenaikan. Hal ini menjadi sinyal bahwa pasar mencoba menyesuaikan harga output terhadap beban biaya input, terjadi pengalihan beban yang dialihkan ke konsumen atau perantara tercermin dari peningkatan harga gabah (GKP), tetapi kenaikan harga GKP ini tidak mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani.

Kondisi ini menjadi ironi tersendiri bagi para petani padi di Indonesia. Kenaikan harga gabah di petani yang sejatinya bertujuan untuk mendorong investasi dan adopsi teknologi dalam pertanian (Aragie & Balié, 2016), menjadi sulit untuk terwujud. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani, kenaikan harga GKP lebih merupakan dorongan atas himpitan kenaikan biaya produksi yang begitu besar, bahkan kenaikannya lebih besar dari kenaikan harga GKP (harga GKP meningkat Rp 1, didorong oleh kenaikan indeks 274 atau 2,74 kali).

Selain itu, perlu juga digarisbawahi bahwa pengaruh waktu pada model regresi Jokowi menunjukkan arah yang negatif (Gambar 3.d). Hal ini mencerminkan penurunan harga musiman atau disebabkan

oleh pengaruh pasar permintaan dan penawaran seperti panen raya yang berlebih atau tekanan harga global yang cenderung lebih rendah dari harga beras domestik.

Pengendalian harga menggunakan instrumen HPP atau rujukan harga pembelian pemerintah berbeda dengan penerapan harga dasar yang membatasi harga gabah di tingkat produsen. Harga pembelian pemerintah atau HPP lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan pasar, termasuk dinamika penawaran dan permintaan, biaya produksi, dan persaingan (Melchior, 2016). Sementara harga dasar adalah instrumen kebijakan yang lebih bertujuan untuk memastikan bahwa produsen menerima harga minimum untuk produk pertanian yang dijual agar pendapatan produsen lebih stabil dan mendorong investasi teknologi produksi pertanian (Aragie & Balié, 2016).

HPP pada masa pemerintahan Jokowi berdasarkan analisis regresi tampak lebih mampu mengikuti dinamika pasar, baik dari sisi input produksi maupun output produksi berupa permintaan-penawaran yang pembentukan harga GKP. Situasi ini berbeda dengan masa pemerintahan SBY yang cenderung lebih bersifat administratif dan rutinitas dalam menentukan kenaikan HPP.

Tujuan dari pengendalian harga beras pada prinsipnya adalah untuk melindungi pendapatan petani dan perlindungan daya beli konsumen ekonomi terbawah (miskin). Instrumen pengendalian harga di Vietnam dilakukan melalui kebijakan ekspor, pengelolaan cadangan nasional, dan intervensi musiman untuk menstabilkan harga domestik. Meskipun strategi ini efektif menjaga stabilitas jangka pendek, terdapat konsekuensi berupa distorsi pasar dan ketidaksesuaian harga domestik dengan harga internasional (Hoang & Meyers, 2015).

Filipina menetapkan pembatasan harga dalam rentang tertentu guna melindungi kepentingan produsen dan konsumen secara bersamaan. Pada tingkat produsen, kebijakan harga dibarengi dengan investasi infrastruktur, adopsi teknologi dan penyuluhan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas (Soliva et al., 2024).

Kebijakan HPP berdasarkan pengalaman dari beberapa negara-negara Asia Tenggara tidak dapat berdiri sendiri. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kebijakan harga harus dikaitkan dengan kebijakan biaya produksi dan perlindungan petani. Diperlukan juga instrumen lainnya seperti kebijakan ekspor, pengelolaan cadangan nasional, dan intervensi musiman untuk menstabilkan harga domestik yang melindungi kepentingan produsen dan konsumen.

### Implikasi Efektivitas HPP terhadap Kesejahteraan Petani

Petani dikatakan lebih sejahtera dalam konteks penerapan HPP jika: harga GKP yang diterima lebih tinggi; harga GKP mengikuti kenaikan biaya produksi, khususnya harga input (benih, pupuk, dan sebagainya); serta variabel waktu tidak menunjukkan tren penurunan atau harga tidak semakn turun seiring waktu).

**Tabel 1. Perbandingan Dampak Model Regresi Periode SBY dan Pemerintahan Jokowi**

| Komponen                         | Model Regresi Pemerintahan SBY  | Model Regresi Pemerintahan Jokowi   |
|----------------------------------|---|---|
| HPP (Rp/Kg)                      | Tidak signifikan, pengaruh negatif kecil  | Sangat signifikan, pengaruh positif kuat  |
| Indeks Harga Input Bulan (Waktu) | Tidak signifikan<br>Signifikan dengan arah positif → harga naik dari waktu ke waktu | Sangat signifikan positif<br>Signifikan dengan arah negatif → harga menurun seiring waktu |
| <i>Intercept</i> (baseline)      | +4513 (positif)   | -39202 (negatif ekstrem) → harga awal sangat rendah                                       |
| Rata-rata Harga GKP              | Lebih stabil dan naik   | Meskipun ada efek HPP, waktu menunjukkan tren harga menurun                               |
| Stabilitas Residual              | Residual relatif stabil   | Error lebih besar   |

Berdasarkan analisis regresi, dalam konteks pengendalian harga gabah, kesejahteraan petani lebih baik pada era pemerintahan SBY. Hal ini disebabkan karena harga gabah atau GKP menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat (dilihat dari nilai koefisien bulan yang bernilai positif). Semakin tinggi harga GKP yang diterima, maka pendapatan petani menjadi lebih baik. Nilai positif dari kenaikan harga GKP juga ditunjukkan oleh harga awal (*intercept*) yang lebih tinggi dan harga lebih konsisten serta dapat diprediksi (nilai  $R^2 = 0,889$ ). Walaupun HPP tidak signifikan dalam

menentukan harga HPP di masa pemerintahan SBY, tetapi kenaikan harga secara alami (tanpa intervensi kebijakan) memberi keuntungan tersendiri bagi petani

Pada model regresi masa pemerintahan Jokowi, walau HPP secara signifikan menentukan harga gabah, tetapi model regresi memperlihatkan kecenderungan penurunan harga gabah dari waktu ke waktu, hal ini ditunjukkan nilai koefisien waktu (bulan) yang bernilai negatif. Ini merupakan indikasi kuatnya tekanan pasar terutama harga global yang lebih rendah dari harga beras domestik dan pasokan yang melimpah.

Lebih miris lagi, dari hasil model regresi diketahui kenaikan harga GKP di masa pemerintahan Jokowi lebih disebabkan oleh dorongan harga input yang meningkat tajam. Kondisi ini berpotensi menekan tingkat keuntungan petani. Terlebih lagi, hasil dari model regresi diketahui kenaikan input lebih besar dari kenaikan harga GKP.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam memengaruhi harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh aspek politik, ekonomi, serta pasar. Dengan membandingkan dua periode pemerintahan SBY (2008–2014) dan Jokowi (2014–2024), ditemukan beberapa perbedaan penting dalam pengaruh dan implementasi HPP terhadap harga gabah.

Pada masa pemerintahan SBY, meskipun HPP tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap harga GKP, harga gabah menunjukkan tren kenaikan yang stabil dan positif dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas harga lebih banyak ditentukan oleh dinamika pasar dan bukan oleh kebijakan harga minimum. Dengan kata lain, kesejahteraan petani tetap meningkat melalui mekanisme pasar, didukung oleh baseline harga yang lebih tinggi dan stabilitas harga yang lebih konsisten.

Sementara pada masa pemerintahan Jokowi, HPP terbukti secara statistik berpengaruh signifikan dan positif terhadap harga GKP, khususnya setelah tahun 2022. Namun demikian, peningkatan harga GKP tersebut lebih disebabkan oleh lonjakan biaya produksi, terutama harga input seperti pupuk dan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan insentif kenaikan harga gabah tidak serta merta berujung pada peningkatan kesejahteraan petani, karena margin keuntungan petani justru tergerus oleh peningkatan biaya input. Model regresi juga menunjukkan tren penurunan harga gabah seiring waktu (koefisien waktu negatif), yang mengindikasikan tekanan pasar domestik maupun global.

Jika dilihat dari perspektif kesejahteraan petani, model regresi masa pemerintahan SBY memberikan indikasi yang lebih menguntungkan, ditandai oleh tren kenaikan harga GKP yang lebih alami dan stabil, meskipun peran HPP relatif lemah. Sebaliknya, masa pemerintahan Jokowi menunjukkan keterkaitan kuat antara HPP dan harga GKP, namun dengan konsekuensi beban produksi yang meningkat dan hasil harga yang tidak sepenuhnya mencerminkan keuntungan riil bagi petani.

Oleh karena itu, HPP sebagai kebijakan harga tidak cukup berdiri sendiri. Efektivitasnya sangat bergantung pada integrasi dengan kebijakan biaya produksi, dukungan infrastruktur, perlindungan pasar, dan intervensi musiman yang terarah. Pengalaman negara lain seperti Vietnam dan Filipina menunjukkan bahwa stabilisasi harga yang berkelanjutan harus disertai dengan reformasi struktural, investasi produktivitas, serta sistem perlindungan sosial yang kuat.

Pemerintah disarankan mereformasi mekanisme penetapan HPP agar lebih responsif terhadap dinamika biaya produksi dan pasar global. Penyesuaian HPP sebaiknya tidak semata bersifat administratif, tetapi didasarkan pada kajian ekonomi riil, termasuk tren harga input, daya beli petani, dan keseimbangan pasokan-permintaan. Selanjutnya, disarankan agar HPP dikaitkan secara otomatis dengan indeks harga input seperti benih, pupuk, dan upah tenaga kerja, sehingga lebih representatif dan melindungi margin keuntungan petani.

Saran lainnya perlu dikembangkan pengelolaan cadangan beras dan intervensi musiman. Cadangan beras nasional harus dikelola secara strategis, dan digerakkan bukan hanya untuk intervensi pasar konsumen tetapi juga pembelian gabah saat harga petani turun. Kebijakan lain yang perlu dikembangkan adalah peningkatan infrastruktur dan akses pasar. Perlu investasi yang lebih kuat dalam jalan tani, irigasi, transportasi, dan digitalisasi informasi harga, agar petani dapat menjual hasil panen dengan biaya transaksi lebih rendah dan harga lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aragie, E., & Balié, J. (2016). Supporting farmers and consumers under food price uncertainty: the role of price support policies. *Research Papers in Economics*. <https://doi.org/10.22004/AG.ECON.246387>
- Barré, T. (2011). Price expectations and price dynamics: the case of the rice sector in developing Asia. *Research Papers in Economics*. <https://ideas.repec.org/p/hal/wpaper/hal-00630711.html>
- Chhom, V., Tsusaka, T. W., Datta, A., & Ahmad, M. M. (2023). Factors influencing paddy producers' profitability and sale to markets: evidence from Battambang Province, Cambodia. *Cogent Food & Agriculture*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311932.2023.2193311>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (P. A. F. dan R. K. Pancasar (ed.); 4th ed.). Penerbit Pustaka Pelajar.
- Cummings, R., Rashid, S., & Gulati, A. (2006). Grain price stabilization experiences in Asia: What have we learned? *Food Policy*, 31(4), 302–312. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2006.03.006>
- Ghosh, M., & Whally, J. (2002). *Are Price Controls Necessarily Bad? The Case of Rice in Vietnam*. <https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1818&context=economicsresrpt>
- Hadi, P. U. (2006). *Dampak Kebijakan Harga Dasar pada Harga Produsen, Harga Konsumen dan Luas Tanam Padi: Belajar dari Pengalaman Masa Lalu*. 6(1), 43963. <https://www.neliti.com/publications/43963/dampak-kebijakan-harga-dasar-pada-harga-produsen-harga-konsumen-dan-luas-tanam-p>
- Hoang, H. K., & Meyers, W. H. (2015). Price stabilization and impacts of trade liberalization in the Southeast Asian rice market. *Food Policy*, 57, 26–39. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.07.009>
- Iwasaki, M. (2020). *Multiple Regression Analysis from Data Science Perspective* (pp. 131–140). Springer, Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-15-2700-5\\_8](https://doi.org/10.1007/978-981-15-2700-5_8)
- Korner-Nievergelt, F., Roth, T., von Felten, S., Guélat, J., Almasi, B., & Korner-Nievergelt, P. (2015). *Assessing Model Assumptions: Residual Analysis* (pp. 75–94). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801370-0.00006-X>
- Malian, A. H., Mardianto, S., & Ariani, M. (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Produksi, Konsumsi Dan Harga Beras Serta Inflasi Bahan Makanan. *Journal of Agricultural Education*, 22(2), 119–146. <https://doi.org/10.21082/JAE.V22N2.2004.119-146>
- Martín, J., de Adana, D. D. R., & Asuero, A. G. (2017). *Fitting Models to Data: Residual Analysis, a Primer*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/68049>
- Melchior, A. (2016). *Food Price Differences Across Indian States: Patterns and Determinants*. <https://nupi.brage.unit.no/nupi-xmlui/handle/11250/2424211>
- Ogah, O. M., Tyo, I., & Abiyoun, P. A. (2019). Analysis of Factors Influencing the Price of Paddy Rice in Benue State, Nigeria. *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics and Sociology*, 1–6. <https://doi.org/10.9734/AJAEES/2019/V33I430184>
- Ruan, Y. (2024). Exploring Multiple Regression Models: Key Concepts and Applications. *Science and Technology of Engineering, Chemistry and Environmental Protection*, 1(7). <https://doi.org/10.61173/yjpt3s59>
- Simatupang, P., Maulana, M., & Nida, S. F. (2018). *Kajian Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah dan Harga Eceran Tertinggi Gabah dan Beras*.
- Soliva, G., Abante, M. V., Vigonte, F., & Estioco, C. J. (2024). Government Intervention: Price Control Mechanism on the Rice Industry in the Philippines. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4841125>